

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator pembangunan yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia secara komprehensif. IPM menilai pembangunan tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kemampuan manusia untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan yang layak, serta mencapai standar hidup yang memadai. Dengan demikian, IPM menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan, bukan sekadar sebagai alat produksi ekonomi (UNDP, 2024).

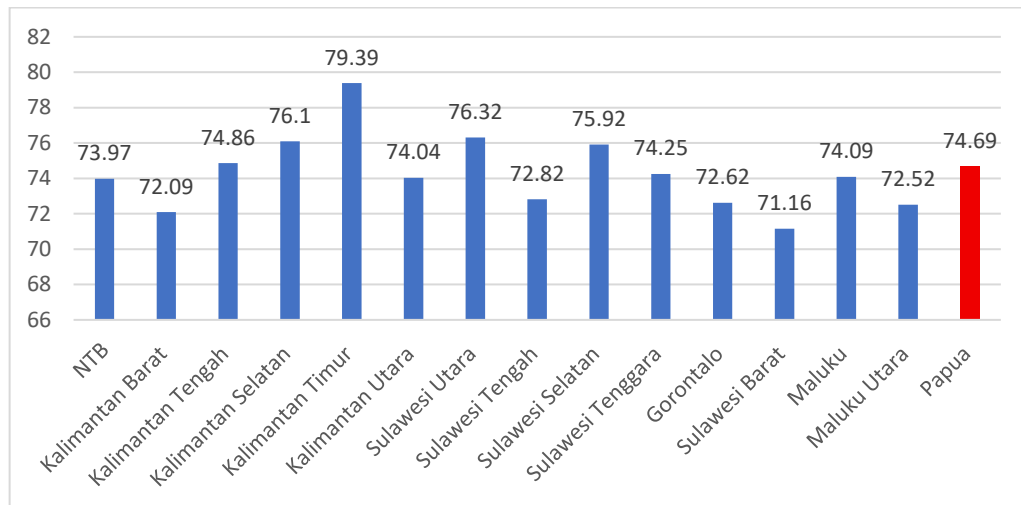
Secara teoretis, konsep IPM berlandaskan pada Teori Pembangunan Manusia (*Human Development Theory*) yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Sen menegaskan bahwa pembangunan seharusnya dipahami sebagai proses perluasan *capabilities*, yaitu kemampuan dan kebebasan manusia untuk memilih kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam pandangan ini, peningkatan pendapatan tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila tidak diikuti oleh perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, IPM digunakan sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan ekonomi dan fiskal mampu memperluas kemampuan manusia secara nyata. Oleh karena itu, IPM menjadi ukuran strategis dalam menilai apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia

Berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik, capaian IPM dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dalam

konteks ini, Provinsi Papua pada tahun terakhir pengamatan memiliki nilai IPM sebesar 74,69, yang menempatkannya pada kategori tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Papua telah mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan (BPS,2025).

Meskipun berada pada kategori tinggi, capaian IPM Papua masih relatif tertinggal apabila dibandingkan dengan beberapa wilayah provinsi lain di bagian timur Indonesia yang telah mencapai kategori tinggi. Kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam pemenuhan layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan kata lain, peningkatan IPM di Papua belum sepenuhnya mampu mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi IPM Papua yang masih berada pada kategori tinggi menjadi sinyal bahwa potensi ekonomi dan dukungan kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Padahal, Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar serta memperoleh dukungan fiskal yang signifikan melalui kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi khusus. Ketidakseimbangan antara besarnya potensi dan capaian pembangunan manusia tersebut menjadi permasalahan penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Ada pun beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia yang memiliki capaian sama tinggi sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah kembali)

Gambar 1.1 Persentase Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Kawasan Timur yang memiliki Capaian Tinggi Tahun 2025 (persen)

Berdasarkan grafik gambar 1.1 di atas terlihat bahwa Provinsi Papua tidak menempati posisi terendah, dengan capaian IPM sebesar 74,69. Angka ini berada pada kategori tinggi, serta lebih baik dibandingkan beberapa provinsi lain di kawasan timur seperti Sulawesi Barat (71,16), Maluku Utara (72,52), dan Gorontalo (72,62). Namun demikian, capaian IPM Papua masih berada di bawah beberapa provinsi lain di kawasan timur, seperti Sulawesi Selatan (75,92), Sulawesi Tengah (76,32), dan Kalimantan Timur (79,39). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Papua tidak tertinggal secara absolut, kinerja pembangunan manusianya belum sepenuhnya optimal jika dikaitkan dengan dukungan fiskal yang diterima.

Perlu dicermati bahwa Papua memiliki keistimewaan fiskal melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di kawasan timur Indonesia. Dana Otsus dirancang sebagai instrumen afirmatif untuk mempercepat pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

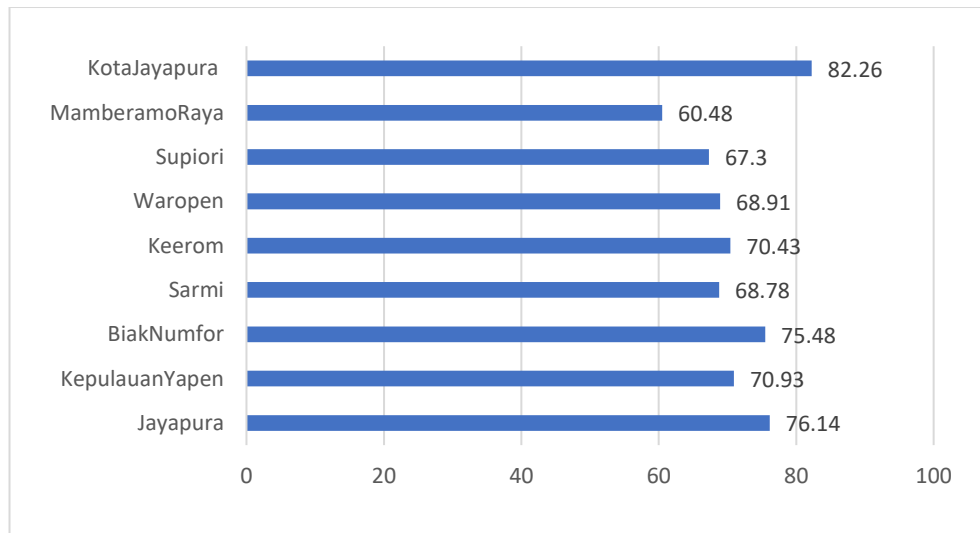
masyarakat, yang merupakan komponen utama pembentuk IPM. Oleh karena itu, secara teoritis, Papua seharusnya mampu mencapai tingkat IPM yang lebih tinggi atau setidaknya sejajar dengan provinsi lain yang tidak memperoleh perlakuan fiskal khusus.

Sementara itu, capaian IPM provinsi-provinsi yang berada di bawah Papua dapat dipandang sebagai kondisi yang relatif wajar, mengingat keterbatasan dukungan fiskal khusus yang mereka terima. Dengan kata lain, ketiadaan Dana Otonomi Khusus pada provinsi-provinsi tersebut menjadikan ruang fiskal mereka lebih terbatas dalam mendorong pembangunan manusia, sehingga capaian IPM yang lebih rendah dapat dipahami dalam konteks keterbatasan sumber daya fiskal.

Oleh karena itu, posisi Papua yang belum mampu unggul secara signifikan meskipun memperoleh Dana Otonomi Khusus justru menjadi fenomena penting untuk diteliti. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi permasalahan dalam efektivitas pengelolaan dan alokasi kebijakan fiskal daerah, dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Provinsi Papua memiliki karakteristik yang unik dalam konteks pembangunan nasional. Berbeda dengan provinsi di atas, Papua memperoleh Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang secara eksplisit dirancang untuk mempercepat pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, rendahnya capaian IPM di tengah besarnya dukungan fiskal menandakan bahwa proses pembangunan di Papua masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam mengubah potensi ekonomi dan dukungan fiskal menjadi peningkatan kapabilitas manusia. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif dan

berorientasi pada manusia. Capaian IPM Papua yang berada pada kategori tinggi juga menyembunyikan permasalahan ketimpangan antar wilayah kab/kota provinsi Papua. Adapun data indeks pembangunan manusia di kab/kota di provinsi Papua sebagai berikut.



Sumber: Direktorat Jendral Keuangan, 2026 (dialah kembali)

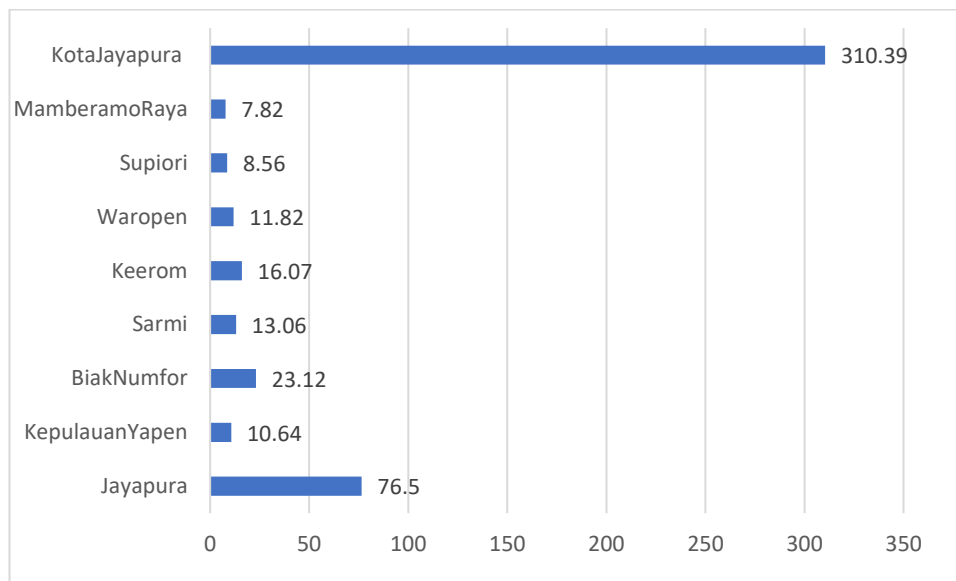
Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Papua 2025 (Persen)

Jika dilihat lebih rinci pada tingkat kabupaten/kota, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam capaian IPM, di mana beberapa daerah perkotaan mencatat nilai IPM yang relatif lebih tinggi, sementara sebagian besar kabupaten di wilayah pedalaman dan terpencil masih tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM di Papua belum terjadi secara merata, baik dari sisi akses pendidikan, layanan kesehatan, maupun daya beli masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap indeks Pembangunan manusia adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu

daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal guna membiayai pembangunan daerah secara mandiri (Kuncoro, 2019). Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, maka semakin luas pula ruang fiskal pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis, peningkatan PAD diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan PAD memberikan fleksibilitas anggaran bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang merupakan komponen utama dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Halim, 2020). Dengan demikian, PAD berperan sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya menopang aktivitas ekonomi daerah, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup penduduk. Namun demikian, beberapa penelitian juga menegaskan bahwa besarnya PAD tidak secara otomatis meningkatkan IPM, apabila tidak diikuti dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada pembangunan manusia. Halim dan Kusufi (2014) menekankan bahwa kualitas belanja daerah menjadi faktor penentu dalam mengubah kapasitas fiskal menjadi output pembangunan manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara PAD dan IPM tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola fiskal daerah. Di bawah ini adalah pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua pada tahun 2025.



Sumber: Direktorat Jendral Primbangan Keuangan (DJPK)

Gambar 1.3 Pendapatan Asli Daerah di Papua 2025 (Milyar Rupaih)

Berdasarkan Gambar 1.3 Pendapatan Asli Daerah di Papua Tahun 2025, terlihat bahwa kapasitas fiskal antar kabupaten/kota di Provinsi Papua menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar. Kota Jayapura memiliki PAD paling tinggi, yakni sebesar Rp310,39 miliar, jauh melampaui kabupaten/kota lainnya. Sementara itu, sebagian besar kabupaten seperti Supiori (Rp8,56 miliar), Mamberamo Raya (Rp7,82 miliar), Waropen (Rp11,82 miliar), dan Kepulauan Yapen (Rp10,54 miliar) masih memiliki PAD yang relatif rendah.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal daerah di Papua masih sangat terkonsentrasi pada wilayah perkotaan, khususnya Kota Jayapura sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Rendahnya PAD di sebagian besar kabupaten mencerminkan terbatasnya basis ekonomi lokal, rendahnya aktivitas usaha, serta ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Otonomi Khusus.

Kondisi PAD di Papua ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut karena meskipun Provinsi Papua memperoleh dukungan fiskal yang besar melalui Dana Otonomi Khusus, ketimpangan PAD antarwilayah menunjukkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi belum terdistribusi secara merata hingga ke tingkat kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM di Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya transfer fiskal, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerahnya.

Dengan demikian, rendahnya PAD di sebagian besar kabupaten/kota di Papua dapat menjadi salah satu faktor struktural yang menjelaskan mengapa capaian IPM Papua, meskipun telah berada pada kategori tinggi, belum menunjukkan lompatan signifikan dibandingkan provinsi lain di kawasan timur Indonesia yang tidak memiliki Dana Otonomi Khusus

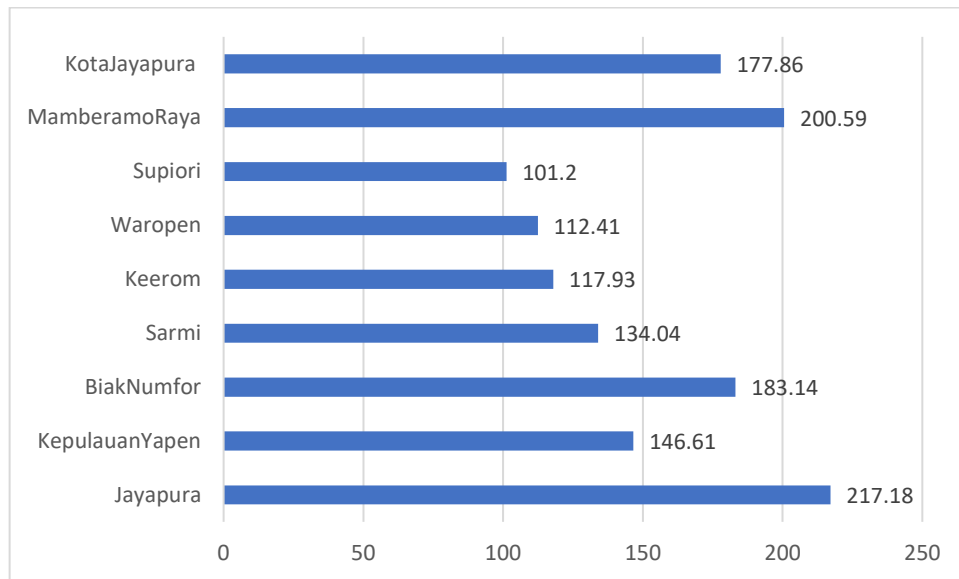
Pemerintah pusat memberikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua sejak tahun 2002. Dana ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Dana Otsus dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. (Kemenkeu, 2024).

Secara teori, kebijakan ini sejalan dengan Musgrave yaitu teori keadilan fiskal yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya publik secara adil antarwilayah agar tercapai pemerataan pembangunan nasional. Dalam hal ini dana otonomi khusus berperan sebagai bentuk transfer fiskal vertikal yang dirancang

untuk memperkecil ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).

Sejalan dengan penelitian Fauzi dan Maulana (2021) menemukan bahwa dana otonomi khusus memiliki pengaruh positif terhadap indeks Pembangunan manusia di Provinsi Aceh. Peningkatan alokasi dana Otsus berkontribusi signifikan terhadap dimensi pendidikan dan kesehatan masyarakat, terutama melalui program beasiswa dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan. Hasil penelitian Zainuddin dan Rahmawati (2020) juga menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Otsus yang efektif mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada tata kelola dan transparansi penggunaan anggaran di tingkat daerah.

Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya dana Otsus belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas manusia. Menurut (Riani & Widiastuti 2023) besarnya dana Otonomi Khusus di Papua tidak otomatis meningkatkan IPM, karena sebagian besar masih digunakan untuk belanja rutin dan birokrasi, bukan investasi jangka panjang seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya,(Patra, Latuheru, & Wonda 2022) menjelaskan bahwa rendahnya dampak dana Otsus terhadap pembangunan manusia disebabkan oleh ketimpangan implementasi dan lemahnya akuntabilitas fiskal di tingkat daerah. Berikut adalah data Dana Otonomi Khusus di Kabupaten /Kota provinsi Papua tahun 2025.



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk)

Gambar 1.4 Dana Otonomi Khusus di Papua tahun 2025 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.4, terlihat bahwa alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) antar kabupaten/kota di Provinsi Papua juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kabupaten Jayapura memperoleh dana Otsus terbesar, yakni sekitar Rp217,18 miliar, disusul oleh Kota Jayapura sebesar Rp177,86 miliar dan Kabupaten Mamberamo Raya sebesar Rp200,59 miliar. Sementara itu, beberapa kabupaten lain seperti Supiori (Rp101,2 miliar), Waropen (Rp112,44 miliar), Keerom (Rp117,93 miliar), dan Sarmi (Rp134,04 miliar) menerima dana Otsus dalam jumlah yang relatif lebih kecil.

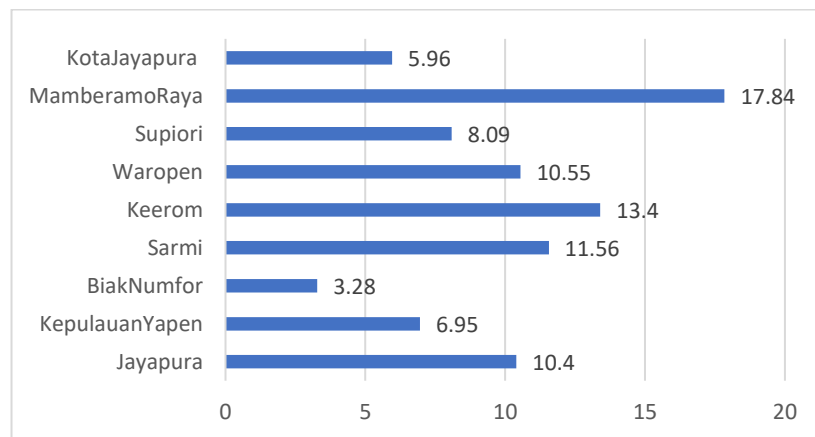
Distribusi dana Otsus ini menunjukkan bahwa meskipun seluruh wilayah Papua memperoleh afirmasi fiskal melalui kebijakan otonomi khusus, besaran dana yang diterima tidak sepenuhnya merata, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, luas daerah, jumlah penduduk, serta kebutuhan pembangunan masing-masing daerah. Dana Otsus pada dasarnya dirancang sebagai instrumen percepatan

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah di sebagian besar kabupaten/kota Papua, maka dana Otsus cenderung berperan sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan daerah, bukan sebagai pelengkap kapasitas fiskal daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana Otsus ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah di Papua masih terbatas, sehingga efektivitas pemanfaatan dana Otsus menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Selain dari pendapatan asli daerah dan dana otonomi khusus, belanja bantuan sosial juga merupakan salah satu instrumen fiskal yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave, pengeluaran publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Belanja bantuan sosial termasuk dalam fungsi distribusi, di mana pemerintah berperan untuk mendistribusikan kembali pendapatan guna mengurangi ketimpangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, peningkatan alokasi belanja bantuan sosial diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerataan hasil pembangunan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di daerah. Ada pun grafik belanja bantuan sosial di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2025 sebagai berikut.



Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

Gambar 1.5. Belanja Bantuan Sosial di Papua tahun 2025 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.5 belanja bantuan sosial kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2025, terlihat adanya perbedaan alokasi belanja bantuan sosial yang cukup signifikan antar daerah. Variasi ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial belum merata dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan, kerentanan sosial, serta keterbatasan akses pelayanan dasar yang lebih tinggi cenderung mengalokasikan belanja bantuan sosial dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

Perbedaan belanja bantuan sosial tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain tingkat kemiskinan masyarakat, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta jumlah penduduk penerima bantuan. Wilayah Papua yang memiliki keterbatasan infrastruktur, biaya distribusi yang tinggi, dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah memerlukan alokasi bantuan sosial yang lebih besar sebagai bentuk perlindungan sosial. Selain itu, perbedaan prioritas

kebijakan fiskal pemerintah daerah juga memengaruhi besarnya belanja bantuan sosial yang dialokasikan dalam APBD.

Belanja bantuan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan sosial membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, akses layanan kesehatan, serta keberlanjutan pendidikan, yang merupakan komponen utama dalam perhitungan IPM. Dengan adanya bantuan sosial, daya beli masyarakat meningkat sehingga berdampak positif terhadap standar hidup layak, sementara akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi lebih terjamin.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh positif terhadap IPM. Harsono et al. (2023) menyatakan bahwa peningkatan belanja bantuan sosial mampu mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, sehingga berkontribusi pada peningkatan nilai IPM. Hasil penelitian lain oleh Diana dan Yustie (2024) di wilayah Papua juga menemukan bahwa program bantuan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, khususnya pada dimensi kesehatan dan standar hidup masyarakat. Temuan ini menguatkan bahwa bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan yang efektif dalam mendukung pembangunan manusia di daerah tertinggal dan berisiko tinggi kemiskinan.

Sejalan dengan, beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan positif antara belanja bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rinaldi dan Nugraha (2021) menemukan bahwa belanja sosial daerah berpengaruh

signifikan terhadap peningkatan IPM di Indonesia, terutama pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Siregar dan Sutrisno (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja bantuan sosial mampu menekan kesenjangan sosial dan meningkatkan capaian pembangunan manusia di wilayah tertinggal. Selain itu, penelitian Handayani dan Fitria (2022) menyatakan bahwa alokasi belanja bantuan sosial yang proporsional di daerah-daerah Otonomi Khusus, seperti Papua dan Aceh, berkontribusi terhadap peningkatan dimensi kesehatan dan pendidikan masyarakat, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas pengelolaan program.

Dengan demikian, variasi belanja bantuan sosial antar kabupaten/kota di Provinsi Papua mencerminkan perbedaan kebutuhan sosial dan tingkat pembangunan wilayah. Semakin besar alokasi belanja bantuan sosial, semakin besar pula potensi peningkatan IPM, terutama dalam upaya menurunkan kerentanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, variasi belanja bantuan sosial antar kabupaten/kota di Provinsi Papua mencerminkan perbedaan kebutuhan sosial dan tingkat pembangunan wilayah. Semakin besar alokasi belanja bantuan sosial, semakin besar pula potensi peningkatan IPM, terutama dalam upaya menurunkan kerentanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Povinsi Papua 2022-2025”**.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai sejauh mana kebijakan fiskal daerah berperan dalam meningkatkan pembangunan manusia di wilayah yang memiliki karakteristik sosial ekonomi unik seperti Papua.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang ada maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 2022-2025.
2. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 2022-2025.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 2022-2025
2. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 2022-2025

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian terkait Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Papua memiliki kegunaan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang fiskal.

Hal yang baru dalam penelitian ini adalah dana otonomi khusus sebagai variabel yang di analisis terhadap indeks Pembangunan manusia di Papua. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan perspektif baru serta memperkaya literatur mengenai keterkaitan antara transisi dana otonomi khusus terhadap indeks Pembangunan manusia.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan terkait fiskal terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2022-2025. Selain itu dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan.

2. Bagi Jurusan

Bagi jurusan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dalam perkuliahan untuk memperkaya pemahaman mahasiswa.

3. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini, dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengelola dengan baik terkait

desentralisasi fiskal khususnya di daerah yang masih butuh perhatian yaitu Papua . Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat di gunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah di terapkan sebelumnya.

4. Bagi Pihak Lain

Dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah atau wilayah fisik Dimana penelitian dilakukan secara langsung untuk mengupulkan data yang sessui dengan tujuan penelitian (Osin dan kasiadi, 2023). Penelitian dianggap penting karena berhubungan dengan data yang di car peneliti sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Adapun penelitian ini yaitu provinsi Papua.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2026																			
		2025				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan <i>outline</i> dan rekomendasi pembimbing	■																			
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana awal		■																		
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal			■																	
4	Seminar proposal skripsi				■																
5	Revisi proposal skripsi dan persetujuan revisi					■	■	■	■												

